



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
IN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI**

Kendral A. Yani No 10, Telanaipura, Jambi. Telpn : 0741-63391 Fax : 0741-63391



NERACA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1. 05 Unit Organisasi : 1. 05. 02 Sub Unit Organisasi : 1. 05. 02. 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
--	---

URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	400.000,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Sekura Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	16.584.950,13	8.218.997,00
Persediaan	5.376.980,00	2.653.200,00
	21.961.930,13	11.272.197,00
JUMLAH ASET LANCAR		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Dana Bergulir	0,00	0,00
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
	0,00	0,00
JUMLAH Penyisihan Piutang Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen		
	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	8.206.767.501,00	7.855.497.501,00
Gedung dan Bangunan	1.237.247.612,00	1.237.247.612,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	105.841.850,00	105.841.850,00
Aset Tetap Lainnya	221.585.000,00	221.585.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(6.472.682.927,63)	(6.185.987.999,27)
	3.298.759.035,37	2.234.183.963,73
JUMLAH ASET TETAP		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		

Urusan Pemerintahan : 1.05
 Unit Organisasi : 1.05.02
 Sub Unit Organisasi : 1.05.02.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

URAIAN		2020	2019
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang			0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00		0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00		0,00
Aset Lain-lain	0,00		0,00
Akumulasi Amortisasi	20.852.295,00		20.852.295,00
akumulasi penyusutan aset lainnya	0,00		0,00
	(20.852.295,00)		(20.852.295,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00		0,00
JUMLAH ASET		3.320.720.965,50	3.245.456.160,73
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00		0,00
Utang Bunga	0,00		0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00		0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00		0,00
Utang Beban	0,00		0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00		0,00
Utang Kepada pihak ketiga	0,00		0,00
Utang Belanja	7.009.293,00		6.872.105,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.009.293,00		6.872.105,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri	0,00		0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00		0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00		0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		7.009.293,00	6.872.105,00
EKUITAS			
EKUITAS	3.313.311.672,50		3.238.584.055,73
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		3.320.320.965,50	3.245.456.160,73

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya

keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- 1.4. Profil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

BAB III. Kebijakan Akuntansi

BAB IV. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2. Penjelasan Pos-pos Neraca
- 4.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
- 4.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

1.4. Profil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengendalian kebakaran;
- b. Penyusunan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Penyusunan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
- d. Penyusunan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Penyusunan kebijakan pengendalian dan pemetaan kebakaran;
- f. Penyusunan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penanggulangan kebakaran dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, Instansi terkait dan/atau aparatur lainnya;
- g. Penyusunan Kebijakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan perda dan peraturan Kepala Daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan
- c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari :
 - 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Ketertiban Umum; dan
 - 3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
- d. Bidang Perundang Undangan daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penegakan perundang-undangan daerah
 - 2. Seksi Hubungan antar lembaga; dan
 - 3. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- e. Bidang Perlindungan masyarakat, terdiri dari :
 - 1 Seksi Data dan Informasi
 - 2. Seksi Pelatihan dan mobilisasi
 - 3. Seksi Kewaspadaan Dini
- f. Bidang Pengendalian Kebakaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemetaan
 - 2. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan, dan
 - 3. Seksi bina potensi
- g. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB II **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR** **PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN**

2.1. Ekonomi Makro

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan tingkat inflasi. Berangkat dari pemahaman seperti itu, maka secara makro kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi dapat dilacak dari perkembangan perekonomian daerah (pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan tingkat inflasi) yang ditunjang oleh perkembangan kehidupan sosial budaya, politik dan keamanan sepanjang tahun 2019 dan pada tahun 2020.

Perkembangan perekonomian daerah yang yang dimaksud tentu tidak dengan sendirinya muncul ke permukaan sebagai sebuah keberhasilan yang tunggal. Perkembangan dimaksud didorong oleh perkembangan sektor-sektor pembangunan lainnya yang satu dan lain hal berawal dari pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian serta kondusifitas kehidupan sosial budaya, politik dan keamanan daerah yang pada akhirnya nanti akan bermuara kepada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang secara kuantitatif akan ditunjukkan oleh perkembangan angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan Usia Harapan Hidup.

Dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian daerah yang semakin baik maka kebijakan perekonomian daerah tahun 2020 diarahkan pada upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar menuju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan tema RKPD Tahun 2020.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi, Rencana Kerja berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun dikaitkan dengan alokasi anggaran dalam APBD setiap tahunnya. Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi merupakan salah satu OPD yang tidak memiliki pos penerimaan/pendapatan sedangkan dari sisi pengeluaran, Perda APBD yang telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan.

2.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Pencapaian target keuangan dicapai melalui program dan kegiatan Satpol PP dan Dinkar Provinsi Jambi sudah baik, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	147.573.636,00	93.111.815,00	63,10
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	121.730.800,00	121.130.800,00	99,51
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	181.332.495,00	181.332.495,00	100,00
4	Penyediaan alat tulis kantor	40.311.804,00	40.311.804,00	100,00
5	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	32.907.900,00	28.752.660,00	87,37
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	6.473.700,00	6.473.700,00	100,00
7	Penyediaan makan dan minum	17.000.000,00	14.768.200,00	86,87
8	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	392.949.140,00	378.846.600,00	96,41
	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur			
9	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	69.500.000,00	68.950.000,00	99,21
10	Pengadaan mobil	278.130.000,00	274.375.000,00	98,65
11	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	0,00	0,00	0,00
12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	155.000.000,00	154.500.000,00	99,68
13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	412.312.000,00	408.680.250,00	99,12
14	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	17.878.500,00	15.315.000,00	85,66
	Program peningkatan disiplin aparatur			
15	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	228.243.450,00	223.975.000,00	98,13

	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kapasitas			
16	Pendidikan dan Pelatihan formal	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
17	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	3.700.000,00	3.600.000,00	97,30
18	Sosialisasi Penerapan SPM Trantibumlinmas	0,00	0,00	0,00
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
19	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.503.250,00	15.342.750,00	98,96
20	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	83.610.764,00	76.897.600,00	91,97
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			
21	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.515.468.650,00	3.511.408.000,00	99,88
22	Kegiatan Kesamaptaan	17.971.132,00	10.835.200,00	60,29
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			
23	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan	86.502.500,00	81.569.200,00	94,30
24	Pengamanan Aset dan Patroli Wilayah	436.743.500,00	368.809.000,00	84,06
25	Pengamanan Unjuk Rasa	99.347.050,00	91.813.400,00	92,42
26	Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Kebijakan Daerah Lainnya	138.175.025,00	129.900.000,00	94,01
27	Peningkatan Kerjasama dalam Penegakan Produk Hukum Daerah	136.519.775,00	136.152.000,00	99,73
	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			
28	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	95.422.625,00	94.317.400,00	98,84
29	Deteksi dini Bencana Alam dan Potensi Terorisme	83.209.500,00	81.895.145,00	98,42
30	Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	97.611.250,00	95.484.900,00	97,82
31	Pembinaan dan Penyuluhan Perlindungan HAM	54.757.500,00	54.747.200,00	99,98
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			

32	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	35.194.300,00	33.144.300,00	94,18
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran			
33	Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	100.000.000,00	99.806.950,00	99,81
34	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	38.110.500,00	36.724.500,00	96,36
35	Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	92.591.550,00	87.058.100,00	94,02
	Program Kelembagaan dan Organisasi			
36	Rapat Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja	76.631.400,00	76.631.400,00	100,00
	TOTAL :	7.317.913.699,00	7.104.395.372,00	97,08

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi yang bersumber dari Standar Akuntansi Pemerintahan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2015, memuat kebijakan spesifik untuk dipergunakan di Pemerintah Provinsi Jambi.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas dana dan basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3.1. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar

Pos-pos Aset Lancar pada Neraca Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi terdiri dari Kas dan Persediaan.

a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

b. Persediaan

- Pengakuan persediaan menggunakan pendekatan aset, persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai dan dikonsumsi.
- Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan.
- Persediaan dicatat dengan metode periodik. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode, dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

- Pengukuran pemakaian persediaan berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal ditambah perolehan persediaan dikurangi saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

3.2. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Pos-pos Aset Tetap pada Neraca Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi terdiri dari:

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Jaringan dan Instalasi, dan
- e. Aset Tetap Lainnya

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, Aset-aset tersebut dicatat dalam buku ekstrakontabel.
- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

3.3. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Pos Aset Lainnya pada Neraca Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yaitu Aset lain-lain. Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya

3.4. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Pos Kewajiban pada Neraca Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yaitu: Utang Belanja Jasa Kantor. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya.

3.5. Kebijakan Akuntansi Belanja

Pos-pos Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

3.6. Kebijakan Akuntansi Beban

Pos-pos Beban pada Laporan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa dan Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Beban diukur berdasarkan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pagu Anggaran Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi tahun 2020 sebesar Rp. 26.455.908.086,48 dikurangi sebesar Rp. 879.647.837,44 sehingga pagu anggaran Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi menjadi sebesar Rp. 25.576.260.249,04 Rincian Pagu Pendapatan dan Belanja Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Pagu	
	Awal (Rp)	Revisi (Rp)
PENDAPATAN		
Total Pendapatan	0,00	0,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG		
Belanja Pegawai	19.721.908.203,48	18.258.346.550,04
BELANJA LANGSUNG		
Belanja Pegawai	2.446.150.800,00	2.400.831.800,00
Belanja Barang dan Jasa	3.916.183.803,00	4.564.271.899,00
Belanja Modal	371.665.280,00	352.930.000,00
Total Belanja	26.455.908.086,48	25.576.260.249,04

sedangkan apabila dilihat dari program, maka pagu belanja adalah sebagai berikut :

Uraian Program	Jumlah Pagu	
	Awal (Rp)	Revisi (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	949.781.007,00	940.279.478,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	441.855.780,00	932.820.500,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	117.000.000,00	228.243.450,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	107.894.400,00	11.200.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	127.259.650,00	99.114.014,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3.495.209.396,00	3.533.439.782,00
Program Pemeliharaan Kontraintibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	470.006.050,00	899.287.850,00
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	270.039.000,00	331.000.875,00
Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	75.000.200,00	35.194.300,00
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran	557.796.600,00	230.702.050,00
Program Kelembagaan dan Organisasi	122.157.800,00	76.631.400,00
JUMLAH	6.733.999.883,00	7.317.913.816,00

4.1.1. Pendapatan LRA

Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi merupakan salah satu unit pusat biaya (*cost center*) dalam Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Pusat biaya (*cost center*) adalah unit dalam organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan, tetapi sebaliknya hanya menimbulkan belanja.

4.1.2. Belanja

Belanja daerah yang dialokasikan di Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi tahun anggaran 2020 sebesar Rp.25.576.260.249,04 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 24.808.866.264,79 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
5	BELANJA			
5.1	Belanja Operasi	25.223.280.249,04	24.460.196.264,79	96,97
5.1.1	Belanja Pegawai	18.258.346.550,04	17.704.470.892,79	96,97
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.964.639,00	6.755.725.372,00	97,00
5.2	Belanja Modal	352.980.000,00	348.670.000,00	98,78
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	352.980.000,00	348.670.000,00	98,78
JUMLAH		25.576.260.249,04	24.808.866.264,79	97,00

Realisasi Belanja tahun anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.077.284.280,30 dibandingkan tahun anggaran 2019 disebabkan adanya penurunan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Perbandingan realisasi belanja tahun anggaran 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut ini :

Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik/(Turun)	
	TA 2020	TA 2019	Rp	%
BELANJA OPERASI	24.460.196.264,79	25.627.657.545,00	1.167.461.280,30	4,55
Belanja Pegawai	17.704.470.892,79	18.271.256.863,00	566.785.970,30	3
Belanja Barang dan Jasa	6.755.725.372,00	7.356.400.682,00	600.675.310,00	8,17
BELANJA MODAL	348.670.000,00	1.258.493.000,00	909.823.000,00	99,72
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	348.670.000,00	1.258.493.000,00	909.823.000,00	99,72
Jumlah	24.808.866.264,79	26.886.150.545,00	2.077.284.280,29	7,72

4.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintahpusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi pada Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	11.149.871.836,20	10.688.025.894,79	95,85
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	7.108.474.713,84	7.016.444.998,00	98,70
Jumlah	18.258.346.550,04	17.704.470.892,79	96,97

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 17.704.470.892,79 dan Rp. 18.271.256.863,00. Penurunan Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.566.785.971 atau 3,10 % karena tidak ada pembayaran TPP ke 13 dan 14 seperti pada tahun anggaran 2019 dan ditahun berjalan tidak ada pembayaran gaji dan tunjangan serta TPP untuk Eselon II. Perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut ini :

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2020	TA 2019	Rp	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	10.688.025.894,79	10.437.298.272,00	250.727.622,79	2,35
Belanja TPP	7.016.444.998,00	7.798.498.591,00	(782.053.593,00)	(10)
Jumlah	17.704.470.892,79	18.271.256.863,00	566.785.970,30	(3)

b. Belanja Barang dan Jasa

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang dan Jasa	6.964.933.699,00	6.755.725.372,00	97,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp.6.755.725.372,00 dan Rp.7.356.400.682,00. Penurunan Realisasi

Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.600.675.310,00 atau 8,16%. Perbandingan Realisasi Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut ini :

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2020	TA 2019	Rp	%
Belanja Barang dan Jasa	6.755.725.372,00	7.356.400.682,00	(600.675.310,00)	(8,16)

4.1.2.2. Belanja Modal

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	352.980.000,00	348.670.000,00	98,78
Jumlah	352.980.000,00	348.670.000,00	98,78

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 348.670.000,00 dan Rp.1.258.493.000,00 Penurunan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 909.823.000,00 atau 72,30 %. Perbandingan Realisasi Modal Tahun 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut ini :

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2020	TA 2019	Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	348.670.000,00	1.258.493.000,00	(909.823.000,00)	(72,30)
Jumlah	348.670.000,00	1.258.493.000,00	(909.823.000,00)	(72,30)

Rincian Modal Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Harga Per Unit	Jumlah (Rp.)
1	Ac Split	7.350.000,00	7.350.000,00
2	Dispenser	900.000,00	1.900.000
3	Kursi Pelaksana	625.000,00	46.875.000,00
4	Alat Pemadam Kebakaran	534.500,00	5.345.000,00
5	Meja Tambahan (Pratisi)	8.250.000,00	82.500.000,00
6	Meja Pejabat Struktural (lain-lain)	4.900.000,00	98.000.000,00
7	Kursi Pejabat Struktural (lain-lain)	2.350.000,00	47.000.000,00
8	Sepeda	4.975.000,00	59.700.000,00
Jumlah			348.670.000,00

4.2. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

4.2.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 21.961.930,13 dan Rp. 11.272.197,00 Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Rincian Aset Lancar
per 31 Desember 2020 dan 2019

Keterangan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Aset Lancar:		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	400.000,00
Persediaan	5.376.980,00	2.653.200,00
Biaya Dibayar Dimuka	16.584.950,13	8.218.997,00
Jumlah	21.961.930,13	11.272.197,00

4.2.1.1. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp. 5.376.980,00 dan Rp. 2.653.200,00. Persediaan merupakan jenis barang dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Terdapat kenaikan nilai Persediaan sebesar Rp. 2.723.780,00. Rincian persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	ATK	1.149.900,00	2.653.200,00
2	Barang Cetakan	-	-
3	Alat Listrik	-	-
4	Alat Kebersihan	4.227.080,00	-
	Jumlah	5.376.980,00	2.653.200,00

4.2.1.2. Biaya Dibayar Dimuka

Nilai Biaya Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 8.218.997,00. sedangkan per 31 Desember 2020 Biaya Dibayar Dimuka adalah sebesar

Rp.16.584.950,13. Biaya Dibayar Dimuka merupakan Biaya Asuransi Kendaraan Roda Empat dan Asuransi Kesehatan.

4.2.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 9.738.174.258,00 dan Rp. 8.441.024.258,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	8.152.647.501,00	7.855.497.501,00
2	Gedung dan Bangunan	1.237.247.812,00	1.237.247.812,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	105.841.850,00	105.841.850,00
4	Aset Tetap Lainnya	221.535.000,00	221.585.000,00
Nilai Perolehan			
	Akumulasi Penyusutan	(6.757.364.439,35)	(6.186.967.999,27)
Nilai Buku			

4.2.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 8.152.647.501,00 dan Rp. 7.855.497.501,00. Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 6.757.364.439,35 sehingga nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar :

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	7.855.497.501,00
Mutasi Tambah :	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.258.493.000,00
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	-
Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	9.738.174.258,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020	6.757.364.439,35
Nilai Buku per 31 Desember 2020	

4.2.2.2. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 1.237.247.612,00 dan Rp. 1.237.247.612,00. Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 329.106.368,08 sehingga nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar Rp. 908.141.243,92

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	1.237.247.612,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020	329.106.368,08
Nilai Buku per 31 Desember 2020	908.141.243,92

4.2.2.3. Jalan, Jaringan dan Instalasi

Nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 105.841.850,00 dan Rp. 105.841.850,00 Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 39.402.823,75 sehingga nilai buku Jalan, Jaringan dan Instalasi pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar Rp. 105.841.850,001

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	105.841.850,001
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020	39.402.823,75
Nilai Buku per 31 Desember 2020	66.439.026,25

4.2.2.4. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 221.585.000,00 dan Rp. 221.585.000,00 Aset Tetap Lainnya merupakan Barang bercorak kesenian dan kebudayaan.

4.2.2.5. Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. (6.472.682.927,00) dan Rp. (6.185.987.999,27). Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Jaringan dan Instalasi dan Aset lain-lain.

Uraian	Jumlah (Rp)
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019	6.185.987.999,24
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.824.685.435,90
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	304.361.415,84

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi	
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020	36.088.852,50
	6.757.364.439,35

4.2.3. Aset Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 20.852.295,00 dan Rp. 20.852.295,00. Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2020 sebesar (Rp.20.852.295,00). Aset Lainnya merupakan aset lain-lain yaitu aset dalam kondisi rusak berat.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	
Mutasi Tambah :	20.852.295,00
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020	20.852.295,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	-

4.2.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 7.009.293,00 dan Rp. 6.872.105,00 Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang belanja jasa kantor pada tanggal pelaporan.

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Belanja Air	19.500,00	19.500,00
2	Belanja Telepon	29.500,00	43.360,00
3	Belanja Listrik	6.693.293,00	6.811.245,00
4	Belanja TV Kabel	267.000,00	0,00
	Jumlah	7.009.293,00	6.872.105,00

4.2.5. Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp.3.313.311.672,50 dan Rp. 3.238.584.055,73 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

4.3.1. Pendapatan-LO

Tidak terdapat Pendapatan-LO pada Laporan Operasional Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi karena sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan, tetapi sebaliknya hanya menimbulkan belanja.

4.3.2. Beban

Jumlah Beban tahun 2020 dan 2019 masing-masing Rp.24.735.938.648,02 dan Rp. 26.298.380.200,02. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan operasional. Rincian Beban tahun 2020 dan 2019 disajikan sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Naik/ (Turun)	
	2020	2019	Jumlah	%
Beban Pegawai-LO	17.704.470.892,02	18.271.256.863,00	566.785.970,21	5,94
Beban Barang dan Jasa	6.744.772.826,87	7.359.595.991,23	614.823.164,36	8,35
Beban Penyusutan	286.694.928,36	667.527.345,79	380.832.417,43	57,05

4.3.2.1. Beban Pegawai-LO

Jumlah Beban Pegawai-LO tahun 2020 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 17.704.470.892,79 dan Rp. 18.271.256.863,00. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Rincian Beban Pegawai disajikan sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai

Uraian	Realisasi		Naik/ (Turun)	
	2020	2019	Jumlah	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	10.688.025.894,79	10.437.298.272,00	250.727.622,70	2,35
Belanja TPP	7.016.444.998,00	7.798.498.591,00	782.053.593,00	(10)
Jumlah	17.704.470.892,79	18.235.796.863,00	566.785.970,30	(3)

4.3.2.2. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp.6.744.772.826,87 dan Rp. 7.359.595.991,23 Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan sebagai berikut:

Beban Barang dan Jasa

Uraian	Realisasi		Naik/ (Turun)	
	2020	2019	Jumlah	%
Beban Barang dan Jasa	6.744.772.826,87	7.359.595.991,23	(614.823.164,36)	8,35
Jumlah	6.744.772.826,87	7.359.595.991,23	(614.823.164,36)	8,35

4.3.2.3. Beban Penyusutan

Jumlah Beban Penyusutan tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp .286.694.928,36 dan Rp.667.527.345,79 Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencaiat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa aset yang bersangkutan. Rincian Beban Penyusutan disajikan sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan

Uraian	Realisasi		Naik/ (Turun)	
	2020	2019	Jumlah	%
Beban Penyusutan	286.694.928,36	667.527.345,79	(380.832.417,43)	(57,05)

4.3.3. Surplus/ Defisit-LO

Defisit tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 24.735.938.648,02 dan Rp. 26.298.380.200,02 Jumlah per 31 Desember 2020 merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar Rp. 49.471.877.296,04

4.4. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.4.1. Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal per 1 Januari 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 3.313.711.672,50 dan Rp. 26.298.380.200,02

4.4.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp. 24.735.938.648,02 dan Rp. 26.298.380.200,02 Jumlah per 31 Desember 2020 merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar Rp.24.735.938.648,02 sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional.

4.4.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.313.711.672,50 dan Rp. 26.298.380.200,02 Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp.3.320.720.965,50 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp. 7.009.293,00.

**PERHIMPATAN PERUSAHAAN SEPAK
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemasintahan : 1.1
Bidang Pemasintahan : 1.05
Unit Organisasi : 1.05.02
Sub Unit Organisasi : 1.05.02.01

Urusan Wajid Pemasintahan Dasar

Keterbatasan dan Keterbatasan Urusan serta Perhitungan Pemasintahan

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKIAN/ (PENURUNAN)	(%)
8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dihasilkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	PENDAPATAN LUAR BIJASA - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	24.725.938.648,02	26.298.380.200,02	(1.562.441.552,00)	(5,94)
9.1	BEBAN OPERASI	24.735.938.648,02	26.298.380.200,02	(1.562.441.552,00)	(5,94)
9.1.1	Beban Pegawai - LO	17.704.470.892,79	18.271.256.663,00	(566.785.970,21)	(3,10)
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	6.744.772.826,87	7.359.595.991,23	(614.823.164,36)	(8,35)
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN OPERASIONAL

Halaman 1 dari 2

Laporan Keuangan Organisasi
 Unit Organisasi
 Sub Unit Organisasi

Unit Organisasi
 Sub Unit Organisasi

NO. URUT	URAIAN	SALDO				KURANG/KEBUTUHAN		(%)
		2020	2019	2018	2017	2020	2019	
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	280.694.928,36	667.527.345,79	(390.852.417,42)	(57.95)			
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Perjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dan Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	BEBAN UJAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO		(24.735.538.648,02)	(26.728.380.246,97)	1.562.441.222,90	(5,94)			
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		(49.471.877.795,94)	(52.596.702.400,94)	3.174.883.194,90	(5,94)			

Jember, 31 Desember 2020
 PENGELOMPOK ANGGARAN

Drs. H. ADAM S. S. S. S.
 NIP. 19600501199411011

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SISWA KANTON VARIO BERKAS BAKAR DAN BELANJA DAERAH
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

Urutan Wajib Pelayanan Dasar
Keterkaitan dan Keterlibatan Urutan serta Perhitungan Masyarakat
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
1	BELANJA				
1.1	BELANJA OPERASI				
1.1.1	Belanja Pegawai	25.576.260.249,04	24.808.866.264,79	97,00	26.886.150.545,00
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.223.280.249,04	24.460.196.264,79	96,97	25.627.657.545,00
1.2	BELANJA MODAL	18.258.345.550,04	17.704.470.892,79	96,97	18.271.256.653,00
2		6.964.933.690,00	6.755.725.372,00	97,00	7.356.400.682,00
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	352.980.000,00	348.670.000,00	98,78	1.258.493.000,00
		352.980.000,00	348.670.000,00	98,78	1.258.493.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)				
		(25.576.260.249,04)	(24.808.866.264,79)	97,00	(26.886.150.545,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)				
		(25.576.260.249,04)	(24.808.866.264,79)	97,00	(26.886.150.545,00)

Jambi, 31 Desember 2020
PENGGUNA ANGGARAN


Drs. H. APAN SAHABUDIN
NIP. 19680603198010001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1. 05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
Unit Organisasi : 1. 05 . 02	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Sub Unit Organisasi : 1. 05 . 02 . 01	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	3.238.584.055,73	0,00
SURPLUS/DEFISIT-40	(24.735.938.548,02)	(26.298.380.200,02)
DAMPAK KUALITATIF PERUBAHAN KEBIDAJIKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Aset Tetap	0,00	0,00
Selish Revaluasi lainnya	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lancar	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap	2.600.000,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penilaian Pencatatan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Atas Beban Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Pengakuan atas Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Kewajiban	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Silpa Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Piutang Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lain-lain	0,00	0,00
KEHUBUNGAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	24.808.466.264,79	0,00
EKUITAS AKHIR	3.313.711.672,50	(26.298.380.200,02)

Jambi, 31 Desember 2020

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. H. APRI SAHARUDIN

NIP. 19680603198810201